

KAJIAN USAHA MIKRO INDONESIA*1

ABSTRACT

Characteristic which is owned by small enterprise signs some weakness which is potential generates some problem. And this study has an aim to identify profile, role, small enterprise problem, and also at the same time to recommend model development of Indonesia small enterprise. Whereas locations and study object were in West Sumatera, South Sumatera, East Java, West Nusa Tenggara, West Kalimantan, and South Sulawesi. The study using survey method, data-processing by tabulation and data analysis has done by descriptive .

From study result can be concluded that : 1) The development of small enterprise is a national programe which is integral part of generalization development program. 2) To assist in improving small entrepreneur ability, it is needed integrated trainee from every element 3) Required some developing ways to improve access for small enterprise to the bank with: (a) Developing banking corporate system, which is big bank have to become locomotive to assist small banks like BPR, so that can improve the service to small enterprise in the area itself, (b) Simplify of prosedure and credit clauses, (c) Using region otonom to create cooperate part between related deprtment and guaranteed part to extend the budget to strategic sector which has wide affect (d) Needed assisting partner to help in accessing process of banking fund. Whereas for suggestions from this study are as follow:1) Fix access from small entrepreneur to monetary service from bank, 2) Improve efficiency and government support 3) Fix access of small entrepreneur, another monetary service co-operative and Micro Financial Institution (LKM).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi yang memporak-porandakan perekonomian nasional tahun 1997 yang lalu membangkitkan kesadaran pentingnya peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai “ tulang punggung “ perekonomian Indonesia. Berdasarkan kriteria BPS, jumlah usaha kecil di Indonesia tahun 2002 sebanyak 40.1195.611 usaha kecil dan 99,99 persen di antaranya atau 40.195.516 merupakan usaha mikro. Pengembangan UMKM saat ini dan mendatang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia.

^{*)} Hasil Kajian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK bekerjasama dengan Gunatama Megah Business and Management Consultant Tahun 2004 (diringkas oleh : Joko Sutrisno dan Sri Lestari HS)

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro mengisyaratkan adanya kelemahan-kelemahan yang potensial menimbulkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kemudahan dengan paket-paket kebijakan untuk mendorong kehidupan sektor usaha kecil tersebut. Misalnya, kredit usaha tani dan kredit usaha kecil (KUK), namun sayangnya apa yang telah dilakukan berkaitan dengan pemberian kredit tersebut, belum dirasakan manfaatnya keseluruhan oleh sektor usaha mikro.

Atas dasar potensi dan karakteristik tersebut, maka pemberdayaan usaha mikro dinilai masih strategis dan sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional. Peran strategis tersebut antara lain :

- a. Dengan jumlah yang sangat banyak usaha kecil berpotensi menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat
- b. Kontribusi terhadap PDB menurut harga berlaku sebesar 63,11 %
- c. Usaha kecil merupakan pelaku ekonomi utama yang berinteraksi langsung dengan konsumen
- d. Mempunyai implikasi langsung untuk meredam persoalan-persoalan yang berdimensi sosial politik, terbukti pada waktu krisis usaha kecil menengah memegang peran kunci dalam kegiatan produksi dan distribusi.

Oleh karenanya sangat penting untuk mengadakan kajian yang mendalam untuk mengidentifikasi profil, peran, permasalahan usaha mikro sekaligus merekomendasikan model pengembangan usaha mikro di Indonesia. Diharapkan dengan kajian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan kepada pihak-pihak terkait khususnya pembuat kebijakan di sektor, usaha mikro, kecil dan menengah.

1.2 Identifikasi masalah

Hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Sistem pembukuan yang relative sederhana dan cenderung mengikuti kaidah administrasi standar, sehingga datanya tidak up to date. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menilai kinerja usaha mikro.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat ketat
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial perusahaan terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan penekanan biaya untuk mencapai efisiensi yang tinggi.
- f. Kemampuan pemasaran, negosiasi dan diversifikasi pasar yang terbatas.
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal yang rendah, karena keterbatasan sistem administrasi.

1.3 Tujuan dan manfaat

Kajian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui profil usaha mikro di Indonesia
- b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro
- c. Menyusun model pengembangan usaha mikro yang bersifat aplikatif.

Manfaat

Hasil kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi yang aplikatif dalam rangka merumuskan kebijakan pengembangan usaha mikro pada khususnya dan pemberdayaan UMKMK pada umumnya.

II. KERANGKA PIKIR

2.1 Landasan teori

Usaha mikro mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan investasi yang lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari pada yang terjadi di perusahaan besar.

Dengan mempertimbangkan kelangkaan modal dalam negeri dan tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang berlanjut, maka perkembangan usaha mikro merupakan elemen kunci dalam setiap strategi penciptaan lapangan kerja dalam negeri. Daya saing ekonomi nasional dipengaruhi oleh daya saing dan kondisi usaha mikro. Sebagai pemasok input, komponen dan jasa, usaha mikro mempengaruhi daya saing perusahaan besar, termasuk investor asing yang dapat menciptakan peluang pasar usaha mikro. Dengan demikian pengembangan usaha mikro merupakan elemen terpadu dalam strategi daya saing nasional dan terkait erat dengan kebijakan promosi dan investasi. Di Indonesia terutama didaerah pengembangan usaha mikro menjadi kunci dalam usaha mengatasi kemiskinan dan pembangunan ekonomi daerah yang lebih berimbang.

2.2 Kerangka pikir

Salah satu sifat usaha mikro adalah kemampuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia dibandingkan dengan perusahaan besar, oleh karenanya usaha mikro akan cenderung lebih diuntungkan oleh pertumbuhan ekonomi

yang dinamis. Lingkungan terbaik untuk pengembangan bisnis usaha mikro adalah suatu lingkungan dimana pasar untuk input dan output berfungsi secara efektif dalam menyediakan berbagai jasa yang memungkinkan pertumbuhan bisnis. Dalam lingkungan ini, pemerintah seyogyanya terfokus pada fungsi intinya secara efisien dari pada membuat distorsi dalam pasar. Pengalaman baru diberbagai negara industri menunjukkan bawa kebijakan deregulasi telah berhasil mendorong pertumbuhan lapangan kerja, lingkungan yang kondusif dan kompetitif bagi usaha mikro yang berperan sebagai motor penggerak penyesuaian dan perubahan struktural.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Obyek Penelitian

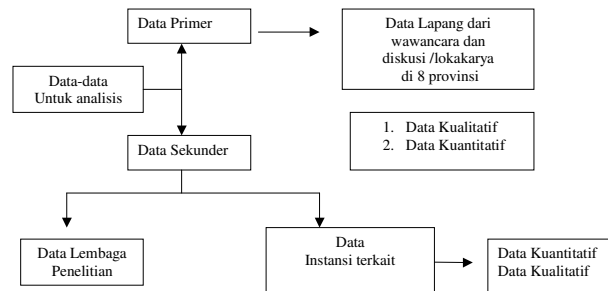
Daerah/ provinsi yang menjadi obyek penelitian adalah : Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat.

3.2. Ruang lingkup kajian meliputi:

- a. Mengidentifikasi kondisi usaha mikro,(fokus kajian pada usaha mikro yang bergerak pada usaha tanaman pangan semusim dan aspek perdagangan).
- b. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi usaha mikro dalam pengembangan usahanya
- c. Mengidentifikasi dukungan perkuatan bagi perkembangan usaha mikro dengan mengkaji alternatif sumber pembiayaan lainnya (misal modal syariah, dan modal ventura).

3.3 Prosedur Penelitian

Kajian ini dilaksanakan dengan method survey dan diskusi daerah. Data primer diperoleh dari data lapang dengan cara wawancara menggunakan daftar pertanyaan, serta diskusi daerah. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, laporan hasil penelitian, dan dokumen dari berbagai instansi terkait. Pengolahan data dengan cara tabulasi , sedang analisa data menggunakan analisa deskriptif sederhana.



Bagan1 . Prosedur Penelitian

IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Usaha Mikro Di Daerah Penelitian

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2003 sekitar 97 % dari seluruh perusahaan di Indonesia Merupakan Usaha Mikro, yaitu 41,8 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 30 % dengan tenaga kerja 71,44 juta, sementara keseluruhan usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 42,5 juta usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 57 %. Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 adalah:

- Usaha produktif milik keluarga atau perorangan
- Penjualan maksimal Rp 100 juta pertahun
- Kredit yang diajukan maksimal Rp 50 juta

Tabel 1 .Perkembangan Usaha Mikro Nasional Persektor Usaha
(dalam juta unit)

Sektor	Tahun			
	2000	2001	2002	2003
Pertanian	11,6	11,8	12,2	12,5
Industri	5	5,2	5,8	6,5
Perdagangan	15	16,1	16,9	18
Lain-lain	3	3	4,4	4,8
T o t a l	34,6	36,1	39,3	41,8

Sumber : BPS

Dari data tersebut ditunjukkan, bahwa secara nasional usaha mikro di Indonesia selama 4 tahun mengalami peningkatan sebesar 7,2% atau rata-rata 2,4%. Usaha mikro yang berjumlah 41,8 juta usaha tersebut kebanyakan berkonsentrasi di subsektor perdagangan yaitu sebanyak 18 juta selanjutnya pertanian 12,5 juta industri 6,5 juta dan lain-lain 4,8 juta.

Adapun sebaran usaha mikro, kecil, menengah di daerah penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sebaran Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Daerah Penelitian

Provinsi	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah Usaha Mikro, kecil, dan menengah
1	2	3	4	5
1. Sumbar	1.525.324	44.606	5.070	1.575.250
2. Sumsel	1.700.205	119.014	6.056	1.825.275
3. Kalsel	896.530	162.019	2.011	1.050.560
4. Kalbar	785.760	275.230	8.370	1.058.360
5. Sulsel	1.723.254	316.365	20.335	2.950.054
6. Sulut	755.650	132.105	2.245	890.350
7. Jatim	2.082.350	400.445	40.655	3.253.450
8. NTB	625.360	153.137	1.503	780.000

Sumber : BPS

Pulau Jawa mendominasi jumlah usaha mikro nasional, sedangkan jumlah usaha mikro berdasarkan sektor dan daerah-daerah kajian ditunjukkan data seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Komposisi Usaha Mikro berdasarkan Subsektor Usaha

Provinsi	Pertanian	Industri	Perdagangan	Lain-lain
1	2	3	4	5
1. Sumbar	25.341	550.350	900.150	49.501
2. Sumsel	50.025	650.020	900.076	29.914
3. Kalsel	46.530	349.176	465.804	35.020
4. Kalbar	85.760	224.150	465.337	10.513
5. Sulsel	223.24	550.002	869.773	80.225
6. Sulut	155.950	210.925	380.190	90575
7. Jatim	602.350	800.238	1.501.998	99.763
8. NTB	25.025	200.360	390.064	9.011

Sumber : BPS

4.2. KEBIJAKAN USAHA MIKRO DAN PENYALURAN KREDIT MIKRO DI DAERAH PENELITIAN

Berbicara tentang usaha mikro tentu tidak terlepas dengan kredit mikro. Pengertian dari kredit mikro sangat terkait dengan pengertian usaha mikro. Secara universal pengertian kredit mikro antara lain diantaranya: Adalah definisi yang dicetuskan dalam pertemuan *The world Summit on Microcredit* di Washington pada tanggal 2-4 Februari 1997 adalah *program/kegiatan memberikan pinjaman yang jumlahnya kecil kepada*

masyarakat miskin untuk kegiatan usaha meningkatkan pendapatan, pemberian pinjaman untuk mengurus diri sendiri dan keluarganya.

Definisi kredit mikro di atas bukanlah harga mati, tentu saja definisi yang lebih luas tentang kredit mikro tergantung dari masing-masing negara. Namun pada dasarnya ada beberapa kriteria dasar dalam menjalankan program kredit mikro yang meliputi:

Tabel 4. Kriteria dasar Program Kredit Mikro
Ada beberapa model kredit mikro baik di Indonesia maupun di mancanegara. Model

KRITERIA	BESARAN	KETERANGAN
1. Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> Pinjaman kecil atau sangat kecil 	Misalnya di kebanyakan kelompok informal/paguyuban pinjaman antara Rp 200.000 s.d. 1.000.000
2. Kelompok Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> Pengusaha kecil (sektor informal) Keluarga berpendapatan rendah 	
3. Penggunaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pendapatan Pengembangan usaha 	
4. Waktu dan Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan sosial (kesehatan, pendidikan) Fleksibel Disesuaikan dengan kondisi persyaratan 	

Sumber : bank Indonesia

kredit mikro yang ada di Indonesia dirancang dan digulirkan pemerintah antara lain : Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha keluarga Sejahtera (KUKESRA), Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Tani (KUT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE). Adapun program kredit mikro yang non pemerintah adalah : arisan, bank plecit, rentenir, koperasi simpan pinjam, dan beberapa model kredit mikro yang digagas dan diselenggarakan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diantaranya yang diselenggarakan oleh YPM Kesuma Multiguna, Bina Swadaya, YPWI, dan beberapa Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi.

Sedangkan model kredit mikro mancanegara antara lain adalah Grameen Bank di Bangladesh, SEWA Bank di India, *Bank for Agricultural Cooperatives* (BAAC) di Thailand, *Rotating Savings and Credit Associations* (ROSCAs) hampir ada di setiap negara dengan berbagai nama dan kegiatan. ROSCAs di Indonesia contohnya adalah arisan, andilan, dan julo-julo.

4.3. Pemanfaatan Dana Perbankan oleh Usaha Mikro

Dari hasil kajian dan data BPS (2000) ditunjukkan bahwa meskipun kebijakan dan program pemberdayaan UKM khususnya : mendorong komitmen perbankan untuk melayani usaha kecil dan mikro dengan mewajibkan seluruh bank menyalurkan 22,5 % sampai 25 % dari total kreditnya untuk usaha kecil dan meningkatkan plafon kreditnya dari Rp 250 juta menjadi Rp 350 juta, ternyata hanya sebagian kecil dari industri kecil (IK) dan industri rumah tangga (IRT) yang memanfaatkan dana perbankan untuk menutupi kekurangan modalnya. Industri kecil yang memanfaatkan pinjaman modal dari bank baru 37,4 % , sedang industri rumah tangga baru 8,6 %. IK dan IRT lebih banyak memanfaatkan tambahan modal dari pihak-pihak lain seperti koperasi, modal ventura, lembaga non bank , keluarga, perorangan, dan lainnya. Rendahnya persentase IK dan IRT memanfaatkan dana perbankan karena sulit memenuhi persyaratan perbankan, birokrasi, dan prosedur yang cukup rumit.

4.4. Hasil analisis SWOT usaha mikro di Indonesia ditunjukkan:

4.4.1 Strength (keunggulan)

Usaha Mikro memiliki keunggulan komparatif :

- a. Usaha Mikro beroperasi menebar di seluruh pelosok dengan berbagai ragam bidang usaha;
- b. Usaha Mikro beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah;
- c. Sebagian besar Usaha Mikro dapat dikatakan padat karya (*labour intensive*)
- d. Hubungan yang erat antara pemilik dan karyawan menyebabkan sulitnya terjadi PHK (Pemutusan Hubungan kerja).

4.4.2 Weakness (kelemahan)

- a. Pemasaran (permasalahan persaingan pasar dan produk; permasalahan akses terhadap informasi pasar, dan permasalahan kelembagaan pendukung usaha mikro
- b. Permodalan
- c. Marjin Usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
- d. Kemitraan
- e. Sumberdaya Manusia. Struktur organisasi dan pembagian kerja/ tugas kurang atau tidak jelas, bahkan sering mengarah pada *one man show*. Sulit mencari dan mempertahankan tenaga kerja atau pegawai yang memiliki loyalitas, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab yang cukup tinggi. Kemampuan manajerial perusahaan masih lemah.
- f. Keuangan. Belum mampu memisahkan manajemen keuangan perusahaan dan rumah tangga. Belum mampu melakukan perencanaan, pencatatan serta pelaporan keuangan yang rutin dan tersusun baik

4.4.3 Opportunity

- a. Ketika dunia terpadu secara ekonomi, bagian komponen-komponennya menjadi lebih banyak, lebih kecil, dan lebih penting. Secara serentak ekonomi global berkembang, sementara ukuran bagian-bagiannya menyusut. Makin besar dan terbuka ekonomi dunia, akan makin besar peran usaha-usaha mikro (*John Naisbitt, Global paradox*)
- b. Perusahaan Multinasional (MNC) cenderung melakukan desentralisasi manajemen yang dikelola secara otonom dalam unit-unit yang lebih kecil yang memberikan kesempatan usaha mikro untuk aktif
- c. Perbaikan akses pasar dan penghapusan *Multifiber Arrangement* (MFA) kesepakatan GATT, yang mana dari jenis-jenis produk tersebut baik pertanian maupun produk-produk dalam rangka MFA pada dasarnya merupakan barang-barang yang diproduksi oleh usaha mikro

4.4.4 Threat

- a. Dalam persaingan global dan kelonggaran pasar akan mengundang para pesaing dari sesama negara berkembang, sehingga dapat diduga persaingan harga akan menjadi lebih ketat, sama seperti persaingan non harga.
- b. Hanya perusahaan yang efisien dan produktif yang mampu memanfaatkan peluang tersebut. Padahal usaha mikro belum mampu mempertahankan kualitas produk, memiliki jaringan pemasaran terbatas, kesulitan menjaga kesinambungan *delivery* (pengiriman), serta lemah dalam promosi.

4.5. Faktor- faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan daya saing dan kinerja usaha mikro antara lain:

1. Lemahnya sistem pembiayaan dan kurangnya komitmen pemerintah bersama legislatif terhadap dukungan permodalan usaha mikro sehingga keberpihakan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan masih belum seperti diharapkan;
2. Kurangnya kemampuan usaha mikro untuk meningkatkan akses pasar, daya saing pemasaran, serta pemahaman regulasi pasar baik pasar domestik maupun pasar global;
3. Terbatasnya informasi sumber bahan baku dan panjangnya jaringan distribusi, lemahnya kekuatan tawar-menawar khususnya bahan baku yang dikuasai oleh pengusaha besar, mengakibatkan sulitnya pengendalian harga;
4. Belum tercapainya *blue print* platformteknologi dan informasi yang meliputi masalah regulasi, pembiayaan, standarisasi, lisensi, jenis teknologi tepat guna, dan fasilitas pendukung teknologi kerja yang mampu digunakan sebagai keunggulan bersaing;
5. Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, keterampilan, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsistensi mutu dan standarisasi produk dan jasa, serta wawasan kewirausahaan;
6. Proses perijinan badan usaha, paten, merk, hak cipta, investasi, ijin ekspor impor yang masih birokratis dan biaya tinggi serta memerlukan waktu yang panjang;
7. Keberadaan jasa lembaga penjamin, asuransi, dan jasa lembaga keuangan non bank lainnya masih belum mampu melayani usaha mikro secara optimal;
8. Tidak berfungsinya secara baik lembaga promosi pemerintah di dalam menunjang

promosi produk dan jasa usaha mikro baik untuk pasar domestik maupun pasar global.

4.6 Hambatan pasar usaha mikro, yang ditemukan dari kajian ini yaitu;

- 1) Distorsi segmen pasar bawah karena penyediaan berbagai jasa pembinaan yang bebas biaya oleh pemerintah dan para donor
- 2) Penyediaan jasa yang tidak memadai
- 3) Kelangkaan modal kerja dan pendanaan

Untuk mengatasi hambatan ini, diusulkan penggunaan instrumen sebagai berikut;

- 1) Skema voucher, untuk mendukung usaha mikro saat pasca pendirian dan formalisasi usaha.
- 2) Skema matching grant untuk diagnostik usaha dan pengembangan strategi usaha jangka menengah.
- 3) Skema matching grant untuk pengembangan produk dan proses kerjasama penelitian dan pengembangan.
- 4) Skema matching grant untuk riset pasar input dan output.

4.7. Strategi Umum Pengembangan Usaha Mikro .

Kebijakan pengembangan usaha mikro yang efektif hendaknya dilakukan secara lebih luas dan terpadu, bukan hanya sekedar membuat daftar program dukungan finansial dan teknis yang berdiri sendiri tanpa adanya kaitan antara satu dengan yang lain. Kebijakan pengembangan usaha mikro memerlukan pengkajian dan reorientasi peran pemerintah dalam banyak aspek. Kebijakan pemerintah yang baik merupakan salah satu isu sentral dalam pengembangan usaha mikro yang berkesinambungan, untuk itu perlu penyempurnaan kebijakan pengembangan usaha mikro oleh pemerintah. Pengaturan pemerintah dan implementasinya sangat mempengaruhi akses usaha mikro. Ketidakpastian hukum akan membuat distorsi dalam pengambilan keputusan akan menyulitkan pengembangan usaha mikro terutama dalam menghadapi pasar yang berkembang dengan dinamis.

Langkah-langkah khusus untuk mempromosikan usaha mikro hanya akan merupakan hal yang semu saja jika tidak dilakukan secara terpadu. Ada beberapa bidang kebijakan prioritas yang perlu dilakukan perbaikan antara lain; penciptaan dan pemeliharaan stabilitas ekonomi makro, reformasi sistim peradilan, serta alih peran penting dalam pengembangan usaha kecil..

Pemerintah dalam mengembangkan usaha mikro perlu menerapkan kebijakan dan program secara transparan dan bertanggung jawab. Stimulasi yang diberikan untuk meningkatkan daya saing secara teknis maupun finansial dinilai tidak dapat langsung mengatasi hambatan-hambatan eksternal maupun internal yang dialami oleh sebagian besar atau bahkan seluruh usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Sebaiknya peran pemerintah adalah menciptakan insentif dan iklim yang kondusif agar usaha

mikro mampu menghadapi persaingan. Secara praktis, hal ini berarti membangkitkan upaya untuk menghilangkan monopoli dan menghapuskan berbagai hambatan perdagangan dalam negeri dan internasional. Dengan meningkatnya peluang bisnis dan akses kepada sumberdaya produktif akan meningkatkan daya saing dan kemampuan berwiraswasta. Instrumen pengaturan juga perlu melihat pada standarisasi dan sertifikasi, serta piranti tidak langsung seperti peningkatan akses informasi dan pelatihan yang relevan.

Pengembangan usaha mikro secara terpadu untuk meningkatkan daya saing dan akses usaha mikro ke sumberdaya produktif perlu dilakukan melalui kebijakan bidang: pengembangan infrastruktur, pembangunan daerah, komunikasi serta angkutan, riset terapan dan pendidikan, promosi, perdagangan dan investasi. Otonomi daerah juga menyebabkan peran dan tugas pemerintah kabupaten/kota dan propinsi lebih meningkat, sehingga masih perlu kajian lebih lanjut untuk melihat lebih jauh tentang peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah untuk mengetahui batas peran dan fungsi masing-masing serta mencegah terciptanya peraturan yang menghambat perdagangan antar daerah. Disamping itu penyediaan informasi yang konsisten, komprehensif dan terintegrasi untuk pengambilan kebijakan politik dan bisnis masih perlu ditingkatkan.

4.8 Fasilitasi koordinasi melalui skema pembiayaan bersama.

Pendekatan baru yang dilakukan dalam pengembangan usaha mikro dan kluster di daerah ialah pengenalan skema pembiayaan bersama (cost sharing). Melalui konsep ini belanja daerah dapat dialihkan atau dialokasikan misalnya 40 % dan pusat menyediakan kekurangan lainnya atau menyediakan insentif bagi stakeholder. Dengan pembiayaan bersama ini pemerintah pusat mendapat keuntungan, karena pusat dapat memperoleh akses langsung ke berbagai sistem dan memahami strategi yang dikembangkan oleh daerah. Skema pembiayaan bersama di daerah akan dilengkapi dengan matching grant scheme untuk mendukung asosiasi bisnis nasional dalam mengembangkan intelligence pasar dalam negeri. Dalam rangka pengembangan konsep ini memerlukan perhatian khusus dalam hal pemantapan koordinasi antara lain karena (a). Saat ini lebih dari 15 Kementerian dan Lembaga Nasional terkait dalam pengembangan UKM khususnya usaha mikro dan (b). Sekurangnya tiga lembaga membawa mandat tumpang tindih dalam kebijakan koordinasi usaha mikro. Koordinasi dalam pengembangan usaha mikro sampai saat ini belum mampu dijalankan secara efektif dan terpadu.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengembangan usaha mikro merupakan program nasional yang memiliki peranan yang strategis karena merupakan bagian integral dari upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan.
2. Dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan pengusaha mikro diperlukan

pembinaan secara terpadu dari semua unsur terutama dinas-dinas terkait agar usaha mikro dapat berkembang secara berkesinambungan yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah dan perekonomian nasional .

3. Masih perlu dikembangkan upaya untuk meningkatkan akses usaha mikro, kepada bank dengan cara :
 - a. Mengembangkan sistim kelembagaan perbankan, Bank besar harus menjadi lokomotif yang dapat mengandeng bank-bank kecil(BPR) agar dapat meningkatkan pelayanan kepada pengusaha mikro di daerah.
 - b. Penyederhanaan formulir dan sarana pendukung lainnya untuk memberikan kemudahan dalam prosedur perkreditan.
 - c. Memanfaatkan keberadaan otonomi daerah untuk menciptakan pola kerjasama antara dinas/instansi terkait dan lembaga penjamin untuk memperluas pembiayaan ke sektor usaha strategis yang berdampak luas.
 - d. Selama ini usaha mikro tidak mampu mengakses kredit kepada bank untuk itu diperlukan adanya :
 - Lembaga pendamping dalam proses untuk mengakses dana
 - Informasi potensi pembiayaan sektor usaha yang diketahui bank.

Dengan upaya tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan usaha mikro secara optimal.

4. Untuk meningkatkan keuangan usaha mikro yang disarankan :
 - 1) Memperbaiki akses dari pengusaha mikro kepada layanan keuangan dari bank
 - 2) Meningkatkan efesiensi dan jangkauan dari dukungan dan layanan pemerintah dalam pemberdayaan keuangan pengusaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi.
 - 3) Memperluas akses dari pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi ke layanan keuangan alternative dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
 - 4). Kredit Program agar difokuskan pada sektor yang tidak dapat dilayani oleh bank umum,
 - 5) Mengkaji ulang peraturan Bank Indonesia tentang agunan, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPAP) dinilai mempunyai dampak yang negatif terhadap akses usaha mikro pada kredit komersial.
 - 6) Penjaminan kredit agar diperluas dan diperbesar jumlahnya
 - 7) Subsidi dan dukungan pemerintah bisa diperuntukkan:
 - untuk menyediakan fee/margin pengelolaan kepada bank penyalur
 - mengambil alih resiko serta biaya yang berhubungan dengan pemindahan dana jangka pendek atau mata uang asing kepada kredit rupiah jangka panjang.
 - Subsidi suku bunga hendaknya jangan diberikan tanpa disertai dengan tujuan dan kriteria yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 1992. **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992.**
Departemen Koperasi dan UKM, Jakarta
- Anoraga, Pandji, SE, MM dan Sudantoko, Djoko, S. Sos, MM. 2002 **Koperasi Kewirausahaan, dan Usaha Kecil.** Rineka Cipta, Jakarta
- Cheston, Suzy dan Kuhn, Lisa, 2002. **Measuring Transformation: Assessing and Improving the Impact of Micro Credit.** Washington D.C. Microcredit Summit Campaign <http://www.microcreditsummit.org/papers/impactpaper.htm>
- Hanson, Ward, 2000. **Pemasaran Internet. Edisi Keempat,** South Western College Publishing, Singapura, 2000.
- Hitt, Michael A, Ireland, R. Duane, Hosjisson, Robert, Robert E, 2001. Manajemen Strategis: **Daya Saing dan Globalisasi. Edisi Keempat,** South Western College Publishing, Singapura, 2001.
- Hubies, M. 1997. **Menuju Industri Kecil Profesional di Era Globalisasi Melalui Pemberdayaan Manajemen Industri (Buku Orasi Guru Besar).** Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Iwantono, Sutrisno. 2002. Kiat Sukses Berwirausaha: **Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan Menengah,** PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2002
- Hollah, Detlev. **ProFI Microfinance Institution Study.** SMERU Working Paper. Denpasar, Maret, 2001.
- Nasution, M.1999. **KOPERASI: Pemikiran dan Peluang Pembangunan Masa Depan.** Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Sebstad, Jennefer, Juni 1998. **Toward Guidelines for Lower-Cost Impact Assessment Methodologies for Microenterprise Programs.** Discussion Paper for the Second Virtual Meeting of the CGAP Working Group on Impact Assessment Methodologies. Washington, D. C. USAID AIMS
- Wijaya, Kresna. 2002. **Kumpulan Pemikiran: Analisis Pemberdayaan Usaha Kecil.** Pustaka Wirausaha Muda, Bogor.